

Abstrak

Kemajuan dalam bidang kedokteran menghasilkan sebuah Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) yang dapat membantu bagi pasangan infertil untuk memiliki keturunan. Adanya kemajuan tersebut menimbulkan persoalan keterlibatan pihak ketiga dari praktik TRB yang identitasnya dirahasiakan (anonimitas). Hal ini dapat dilakukan melalui praktik donor sperma, donor ovum, sewa rahim. Akibat dari anonimitas dalam ketiga praktik tersebut terjadi pelanggaran terhadap hak anak atas identitas biologis yang telah dijamin baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian dokrinal dengan pendekatan konseptual, norma hukum dan perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hak anak atas identitas biologis termasuk kedalam HAM dianalisis dan sesuai pada aspek filosofis, teoretis dan normatif HAM, sehingga hak anak atas identitas biologis merupakan hak asasi manusia. Implikasi TBR terhadap pemenuhan hak anak atas identitas biologis dibuktikan dengan beberapa implikasi hukum, psikologi dan psikososial, dan kesehatan yang didukung oleh beberapa kasus nyata. Kewajiban negara digambarkan dengan beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Indonesia telah mengaturnya dalam rangka pemenuhan hak anak atas identitas biologis. Penelitian ini berkontribusi menjadi bahan kajian dan rujukan dalam proses ikhtiar pemenuhan hak anak atas identitas biologis akibat dari adanya anonimitas dalam TRB.

Kata kunci: *Anonimitas, Hak Asasi Manusia, Hak Anak Atas Identitas Biologis, Kewajiban Negara, Teknologi Reproduksi Berbantu,*

Abstract

Advances in medical science have led to the development of Assisted Reproductive Technology (ART), enabling infertile couples to have children. However, these advancements have also raised concerns regarding the involvement of anonymous third parties in reproductive practices, including sperm donation, egg donation, and surrogacy. The anonymity of such third parties may result in the infringement of a child's right to know their biological identity, a right that is recognized and protected under both international and national legal frameworks. This research employs a doctrinal legal research method using conceptual, statutory, and comparative approaches. Data was collected through library research and analyzed qualitatively.

The findings reveal that a child's right to biological identity satisfies the philosophical, theoretical, and normative dimensions of human rights and, therefore, qualifies as a fundamental human right. The implications of anonymity in ART for the fulfillment of a child's right to biological identity are reflected in various legal, psychological, psychosocial, and health-related consequences, as evidenced by several real-life cases. Furthermore, this study demonstrates that states bear an obligation to ensure the fulfillment of this right, as reflected in the regulatory frameworks adopted in the United Kingdom, Australia, and Indonesia. This research is expected to contribute to the scholarly discourse and serve as a reference for efforts aimed at protecting and fulfilling children's right to biological identity in the context of anonymous practices within ART.

Keywords: *Anonymity, Human Rights, Child's Right to Biological Identity, State Obligation, Assisted Reproductive Technology.*